

SISTEM PENERIMAAN KAS ATAS PENDAPATAN KLAIM BPJS DAN NON BPJS PADA RSUD A. MAKKASAU KOTA PAREPARE

*Cash Receipt System For Bpjs And Non Bpjs Claim Revenue In A.
Makkasau City Parepare*

Fatimah¹⁾, Muhammad Nuzul Achmar²⁾

Email: fatimahumpar11@gmail.com¹⁾, nuzulachmar015@gmail.com²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

The aims of this research to determine the system of cash receipts on BPJS and non-BPJS claim income and to know the comparison of cash receipts on income on BPJS and non BPJS claims at RSUD A. Makkasau, Parepare City. The data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used by researchers are qualitative descriptive analysis techniques, quantitative descriptive, and comparative. The results of the researchers' conclusions on the part of the cash receipts system for claim income of BPJS and Non BPJS at Andi Makkasau Regional Hospital of Parepare are already good and the level of comparison between claim income of BPJS and Non BPJS is 72%.

Keywords: Cash Receipts, Income, BPJS, Non BPJS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan non BPJS dan mengetahui perbandingan atas penerimaan kas pada pendapatan atas klaim BPJS dan non BPJS pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif dan komparatif. Hasil kesimpulan peneliti pada bagian sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare sudah baik dan tingkat perbandingan antara pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS sebesar 72%.

Kata Kunci : Penerimaan Kas, Pendapatan, BPJS, Non BPJS

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan di dasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Bagi rumah sakit umum yang memiliki banyak instalasi dan bagian lain, permasalahan transaksi penerimaan kas atas pendapatan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Karenanya penerimaan kas atas pendapatan ini sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan rumah sakit kedepannya.

Aktifitas penerimaan kas atas pendapatan merupakan salah satu kegiatan bagi rumah sakit setelah memberikan jasa pelayanan bagi pasien, baik itu pelayanan jasa

rawat inap, jasa rawat jalan dan lain sebagainya. Transaksi penerimaan kas menyebabkan aset perusahaan berupa kas atau setara dengan kas bertambah.

Dalam PSAK 23 (revisi) 2017, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normalitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Mulyadi (2010:445) "Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan kredit". Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. Sedangkan pada penerimaan kas rumah sakit berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari pendapatan pasien BPJS dan penerimaan kas dari pendapatan pasien non BPJS. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengolah semua transaksi penerimaan kas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit public dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba, sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah salah satu perusahaan jasa yang dikelola oleh pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi rawat inap, rawat jalan, penjualan obat, *Intensive Care Unit* (ICU), Instalasi Gawat Darurat (IGD), *Irritable bowel syndrome* (IBS), Instalasi laboratorium, instalasi radiologi dan *ambulance*.

RSUD Andi Makkasau sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 Mei 2009, RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dinaikkan statusnya menjadi Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan. Predikat inilah yang merupakan kebanggaan yang membuat seluruh jajaran RSUD Andi Makkasau bekerja secara optimal di dalam melakukan fungsi pelayanan, perawatan bukan hanya secara profesional tetapi juga santun dan beretika.

Selain itu berdasarkan observasi awal di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, menurut salah satu karyawan rumah sakit, Bapak Ishak mengatakan bahwa pendapatan klaim BPJS dan non BPJS merupakan aktivitas penerimaan kas yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah sakit, banyaknya dana yang terlibat tidaklah dalam jumlah yang sedikit, Oleh karena itu pendapatan atas klaim BPJS dan non BPJS menjadi titik perhatian khusus bagi peneliti, seiring dengan berkembangnya sistem, penggunaan BPJS maupun non BPJS sudah merata disetiap golongan masyarakat, dimana pendapatan setiap tahunnya mengalami perubahan. Oleh karena itu pendapatan atas klaim BPJS dan non BPJS dari tahun 2015-2017 mengalami perbandingan pendapatan antara BPJS dan non BPJS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada RSUD Andi Makkasau yang beralamatkan di Jalan Nurussamawati No. 9, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) observasi, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di rumah sakit terhadap analisis penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan non BPJS, 2) Wawancara/*Interview*, yaitu mengadakan pertemuan secara langsung dengan karyawan bagian keuangan pada RSUD A.

Makkasau Kota Parepare, 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dengan menggunakan teknik dokumentasi adalah dokumen berupa catatan pembayaran BPJS dan non BPJS. Teknis Analisis Data dengan menggunakan Analisis Tingkat Pendapatan, yaitu : 1) Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan non BPJS. 2) Teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menghitung total pendapatan klaim BPJS dan non BPJS. 3) Teknik analisis komparatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan pendapatan antara klaim BPJS dan non BPJS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1
Data Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS
Periode Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan Klaim Bpjs	Pendapatan Non Bpjs
2014	Rp. 38.286.340.566	Rp. 15.313.161.113
2015	Rp. 42.277.211.199	Rp. 12.281.383.397
2016	Rp. 62,393,419,452	Rp. 5.200.062.368
2017	Rp. 72.282.343.029	Rp. 4.094.535.677
2018	Rp. 67.763.791.355	Rp. 3.000.398.240
Total	Rp. 283.003.105.601	Rp 24.576.379.682

Sumber : RSUD A. Makkasau (2019)

1. Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mengetahui bagaimana sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan penelitian Kuantitatif berupaya mengetahui bagaimana perbandingan atas penerimaan kas pada pendapatan atas klaim BPJS dan Non BPJS pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.

a. Sistem Penerimaan Kas BPJS Kesehatan pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.

1) Prosedur pelayanan BPJS

- a) Memperlihatkan kartu BPJS
- b) Menyertakan rujukan.

2) Bagan alir penerimaan kas BPJS pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.

b. Sistem Penerimaan Kas Non BPJS pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare

1) Prosedur pelayanan non BPJS

- a) Memperlihatkan KTP dan KK
- b) Menyertakan rujukan.

Dimana cara ini merupakan proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui sistem yang lebih efektif berdasarkan pada unsur informasi yang relevan, informasi yang handal, informasi yang dapat dipercaya, informasi harus

lengkap, informasi harus tepat waktu, informasi harus dapat dipahami dan informasi harus dapat diverifikasi yang akan dipaparkan berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara secara langsung oleh Bapak Irfan Damis SE., M.Si Jabatan Kepala Sub. Bidang Penganggaran sebagai berikut:

a. Informasi Yang Relevan

Relevan berarti bahwa informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna informasi akuntansinya. Relevansi informasi untuk setiap pengguna informasi akuntansi berbeda-beda. Informasi dikatakan relevan bila informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan untuk membuat prediksi atau mengkonfirmasi, atau ekspektasinya dimasa lalu.

b. Informasi Harus Handal (Akurat)

Informasi dikatakan handal jika informasi tersebut tidak memiliki kesalahan yang sifatnya material dan bias, serta secara akurat dapat menjelaskan kejadian atau aktivitas organisasi. Kesalahan-kesalahan material ada ketika informasi yang tidak akurat menyebabkan pemakaiannya membuat keputusan yang buruk atau gagal.RSUD A. Makkasau Kota Parepare pada informasi yang handal (akurat) dapat dipercaya dari hasil verifikasi data yang diolah oleh para pegawai.

c. Informasi Harus Lengkap

Informasi dikatakan lengkap apabila tidak ada bagian informasi yang *essensial* bagi pengambil keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. Informasi yang lengkap tidak menimbulkan kesulitan bagi pemakainya, karena informasi yang disertakan itu akan menjadi unsur kepastian yang besar.RSUD A. Makkasau Kota Parepare memiliki informasi yang memadai atau lengkap tanpa harus mencari informasi yang mendukung.

d. Informasi Harus Tepat Waktu

Informasi dikatakan tepat waktu bila informasi tersedia pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi harus disampaikan secepat mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan perusahaan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Informasi datang kepenerima tidak boleh terlambat karena umur informasi merupakan faktor yang *critical* dalam menentukan kegunaannya.Dalam RSUD A. Makkasau Kota Parepare memiliki informasi yang tepat waktu yang akan dibahas disetiap pertemuan.

e. Informasi Harus Dapat Dipahami

Informasi dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan tersebut dalam format yang dapat dimengerti. Informasi dapat dimengerti oleh pengguna informasi akuntansi karena dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan pengetahuan pengguna informasi akuntansi.Informasi yang ada pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare sudah dapat dipahami karena menggunakan basis komputer yang memudahkan dalam pemrosesan aktivitas rumah sakit.

f. Informasi Harus Dapat Diverifikasi

Informasi itu dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik secara individu dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama dengan bukti berdasarkan data-data dan pernyataan yang benar.Pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare informasi yang digunakan telah diverifikasi dan dievaluasi pada rapat kerja perminggu.

2. Perbandingan Pendapatan Klaim BPJS dan non BPJS

Pendapatan pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare, berasal dari beberapa jenis pendapatan namun pada penelitian ini penelitian berfokus pada pendapatan BPJS dan Non BPJS. Pendapatan BPJS sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh dari proses setelah mengajukan klaim ke pihak BPJS atas biaya yang terjadi selama proses berobat pasien. Sedangkan pendapatan Non BPJS merupakan

pendapatan yang diterima dari hasil pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada pasien.

Selanjutnya setelah didapatkan, data yang terdiri dari data pendapatan BPJS non BPJS selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diakumulasikan secara keseluruhan untuk mengetahui total pendapatan klaim BPJS dan non BPJS pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare yang selanjutnya yang selanjutnya dihitung persentasenya untuk mengetahui tingkat perbandingan antara BPJS dan non BPJS.

Tabel 2
Tingkat Persentase Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS
Periode Tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Klaim BPJS (Rp) (1)	Pendapatan Klaim Non BPJS (Rp) (2)	Total Pendapatan (Rp) (3)	Persentase BPJS (4) = (1) : (3) * 100%	Persentase Non BPJS (5) = (2) : (3) * 100%
2014	38.286.340.556	15.313.161.113	53.599.501.679	71,43%	28,57%
2015	42.277.211.199	12.261.383.397	54.558.594.596	77,49%	22,51%
2016	62.393.419.452	5.200.062.368	67.593.481.820	92,30%	7,69%
2017	72.282.343.029	4.094.535.677	76.376.878.706	94,63%	5,32%
2018	67.763.791.355	3.000.398.240	70.764.189.595	95,76%	4,24%
Total	56.600.621.120	7.977.908.159	64.578.529.279	86%	14%

Sumber : Data diolah (2019)

Pembahasan

1. Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk menghaslkan suatu informasi akuntansi dari hasil kegiatan penerimaan kas dari pasien yang menggunakan BPJS dan Non BPJS. Adapun masalah BPJS yang ada di dalam RSUD A. Makkasau Kota Parepare, dimana anggaran perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun yang juga diimbangi dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan jumlah fasilitas kesehatan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan juga meningkat. Namun pemerintah saat ini belum mampu menaikkan iuran bulanan peserta BPJS, fakta ini menunjukkan bahwa iuran BPJS yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan iuran minimal yang sudah dihitung DJSN. Dan keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta BPJS sehingga menyebabkan adanya kendala dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD A. Makkasau Kota Parepare. Adapun golongan peserta BPJS Kesehatan sebagai berikut :

a. BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)

Peserta BPJS PBI hanya dapat direkomendasikan oleh data rekonsiliasi dari kementerian social atas referensi dari dinas social setempat, jika sesuai kategori miskin dan kurang mampu maka peserta akan didaftarkan menjadi peserta BPJS PBI.

b. BPJS Mandiri

1) Iuran BPJS kelas 1 sebesar Rp 80.000 dan peserta mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap setara kelas 1 dengan jumlah pasien per kamar 2-4 orang.

- 2) Iuran BPJS kelas 2 sebesar Rp 51.000 peserta mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap setara dengan kelas 2 dengan jumlah pasien per kamar 3-5 orang.
- 3) Iuran BPJS kelas 3 sebesar Rp 25.000 peserta mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap setara dengan kelas 3 dengan jumlah pasien per kamar 4-6 orang.

Mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Terkait dengan BPJS non PBI sering terkendala dari maraknya peserta non PBI yang menunggak pembayaran iuran. Hal ini menjadi sesuatu yang *urgent* sebab pihak rumah sakit tidak akan memberikan pelayanan apapun terhadap peserta non PBI yang belum melunasi pembayaran iurannya

c. BPJS Wajib

Iuran bagi peserta penerima upah yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara dan pegawai BUMN, BUMD dan Swasta yang secara otomatis terpotong gajinya untuk pembayaran iuran BPJS.

Dan adapun masalah Non BPJS pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare, dimana sering terjadi keterlambatan pembayaran non BPJS oleh Pemerintah Daerah. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan kesehatan yang menjadi sumber utama, sehingga perlunya menunggu anggaran selanjutnya untuk melunasi pembayaran yang tertunda atau dengan beralih ke anggaran lainnya. Yang menjadi Golongan peserta non BPJS terdiri penduduk Parepare yang masih belum dapat menggunakan kartu BPJS yang artinya Non BPJS diperuntukkan untuk semua penduduk yang tidak mempunyai asuransi kesehatan lainnya dan hanya mendapatkan jenis pelayanan kelas 3.

2. Perbandingan Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS

Pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS memiliki perbandingan pendapatan. Pada pendapatan BPJS tingkat persentasenya sebesar 86% dan pada pendapatan Non BPJS tingkat persentasenya sebesar 14%. Dan memiliki perbandingan sebesar 72%. Pendapatan BPJS sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 hal ini dikarenakan terjadinya peralihan pasien dari pengguna non BPJS menjadi pengguna BPJS, namun ditahun 2018 pendapatan BPJS mengalami penurunan angka pendapatan hal ini disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang rujukan berjenjang, rujukan berjenjang ini mengatur bahwa tidak semua pasien bisa langsung masuk ke RSUD A. Makkasau Kota Parepare untuk mendapatkan pelayanan kesehatan namun perlu terlebih dahulu ke Rumah Sakit lainnya, setelah dari Rumah Sakit lainnya dan masih belum sembuh, maka dapat di ajukan rujukan untuk berobat di RSUD A. Makkasau Kota Parepare, adapun pada pendapatan non BPJS terjadi penurunan terus menerus dari tahun 2014 hingga tahun 2018, hal ini disebabkan karena pasien non BPJS yang sudah beralih dan menggunakan layanan kesehatan BPJS hal ini juga sudah menjadi program pemerintah untuk mengurangi anggaran daerah Kota Parepare.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik sistem informasi akuntansi penerimaan kas atas pendapatan yang hampir terpenuhinya semua unsur karakteristik yang dijalankan oleh RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Aspek-aspek karakteristik sistem informasi akuntansi penerimaan kas meliputi yaitu tugas dan fungsi, rencana atau program serta kebijakan atau informasi yang relavan, informasi yang handal, informasi yang lengkap, informasi yang tepat waktu, informasi dapat dipahami dan informasi dapat diverifikasi.
2. Perbandingan pendapatan klaim BPJS sebesar Rp 56.600.621.120 dan tingkat persentase sebesar 86% sedangkan untuk non BPJS sebesar Rp 7.977.908.159 dengan jumlah persentase pendapatan sebesar 14% pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare. Dan tingkat perbandingan antara pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS sebesar 72%.

Saran

Dalam mencapai tujuan perusahaan, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada RSUD Andi Makassar Parepare. Berdasarkan data dan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

1. Melihat pelayanan yang sudah berjalan dengan baik maka RSUD Andi Makkasau Parepare tetap melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan selalu memperhatikan kritik dan saran dari pasien sebagai bahan intropeksi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
2. Sebaiknya RSUD A. Makkasau Kota Parepare bekerja secara optimal dalam melakukan fungsi pelayanan, perawatan bukan hanya secara profesional tetapi juga santun dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmar, Nur Achriaty. 2016. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Atas Pendapatan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Jurnal Universitas Negeri Makassar.
- Arfan, Ikhsan, dkk. 2008. Sistem Akuntansi Perhotelan, Edisi Pertama Jilid Pertama. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Cetakan ke-11. Jakarta : PT. raja Grafindo Persada.
- Manopo M. D, dkk. 2016. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan Pada PT. Pln (Persero) Area Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.1. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view>. Tanggal akses 05 Desember 2018.
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi Edisi ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi . 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

- Pangalila, Chartika Melisa, dkk. 2015. Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Dppkad Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 No. 04. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile>. Tanggal akses 05 Desember 2019
- Peraturan Menteri Keuangan No. 147/Menkes/PER/I/2010. Tentang Perizinan Rumah Sakit.
- Penyetaraan Standar Akuntansi Keuangan. 2017. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Romney, Stainbart. 2015. *Accounting Information System: Sistem Informasi Akuntansi*. Alfabeta : Bandung.
- Santoso, Iman. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Bandung : Refika Aditama.
- Sitorus, Sofia Perayanti dan Rumapea, Melanthon. 2017. Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Telkom Medan. *Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*. Vol. 1 No. 1. Diambil dari <http://methomika.net/index.php/jmika/issue/view>. Tanggal akses 05 Desember 2019
- S.R. Soemarso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Taliana, Malonda. 2017. Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada RSUD Dr. Sam Ratulangi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Yakub. (2012). *Pengantar Sistem informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, Maulana dan Sudrajat, Jajat. 2014. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Pendapatan Pada Perum Damri Bandung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* Vol. 8, No. 1. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/41310-ID-pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-penerimaan-kas-terhadap-pengendalian-pendapatan.pdf>. Tanggal akses 05 Desember 2019.